



Suara Analisa
Erdi
 Pengamat Kebijakan Publik
Duduk Bersama

SEBAGAI orang yang selalu memperhatikan kinerja pemerintah daerah agak sedih dengan penurunan opini yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalbar. Sebelumnya pada tahun lalu Pemerintah Provinsi Kalbar menerima opini WTP dari BPK. Akan tetapi pada tahun ini predikat tersebut turun ke opini WDP. Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi harus bisa duduk bersama untuk meraih gelar WTP. Salah satu cara



• **Baca Halaman 7**

Hal 1 ■ **duduk bersama**

untuk meraih predikat WTP di antaranya adalah dengan membahas tuntas APBD secara bersama-sama.

Predikat WDP yang diraih Pemerintah Provinsi Kalbar disebut karena pengalihan anggaran yang dilakukan oleh gubernur dan tidak melalui mekanisme DPRD. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena saya yakin Gubernur melakukan pengalihan anggaran, pasti untuk manfaat yang lebih besar. Akan tetapi jika hal tersebut dilakukan dan tidak sesuai dengan undang-undang juga menjadi kurang bermakna.

Tindakan baik, jika dilakukan tidak prosedural maka dianggap sebagai sesuatu yang salah. Komunikasi Gubernur dengan DPRD Provinsi juga harus diperbaiki. Gubernur juga jangan terlalu ngotot. Dalam beberapa statemennya di media, Gubernur menyakiti anggota dewan. Setiap anggaran, pembahasannya harus bersama-sama dengan DPRD Provinsi melalui badan anggaran.

Komunikasi DPRD Provinsi dan Gubernur sangat diperlukan. Komunikasi juga sebagai media awal untuk meningkatkan kinerja. DPRD juga tidak bisa dinomorduakan, terutama dalam hal penyusunan anggaran. Publik menganggap Gubernurnya mantap, akan tetapi setelah dikroscek melalui undang-undang ternyata tidak mantap.

BPK hanya melakukan penelusuran apa yang sudah ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD. Ketika ada yang ditemui tidak klop, maka akan ditetapkan sesuai aturan yang ada. Bang Midji juga jangan suazan kepada BPK, karena BPK bekerja sesuai aturan yang ada.

Gubernur jangan terlalu berpikiran negatif terhadap hasil penilaian yang telah dilakukan oleh BPK. Akan lebih baik jika Pemerintah Provinsi melakukan introspeksi agar ke depannya bisa mendapatkan WTP. Gubernur membutuhkan orang pintar seperti akademisi agar bisa menyambungkan komunikasi antara Pemerintah Provinsi dan DPRD. **(din/bls)**